

BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang :

1.1 Perekonomian Perdesaan.

Sebelum membicarakan perekonomian perdesaan, perlu dipahami dulu tentang wilayah perdesaan menurut AE Yustika, 2006 bercirikan ;

- a. Lokasi jauh dari pusat kota,
- b. Terbatasnya infra struktur ekonomi,
- c. Sedikitnya kesempatan kerja diluar pertanian atau *off farm* serta
- d. Jauh dari pasar.

Diwilayah perdesaan Indonesia pada umumnya dihuni oleh warga desa yang rata-rata berprofesi sebagai petani berskala kecil dan berpendapatan rendah . Warga desa tersebut merupakan golongan terbesar dalam populasi penduduk Indonesia, bahkan mereka juga merupakan golongan terbesar dari penduduk Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan serta kondisi kemiskinan diwilayah perdesaan lebih besar dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan (Affendi Anwar, 2005). Berdasarkan pengalaman pembangunan dimasa lalu yaitu pembangunan industrialisasi yang berlokasi di perkotaan , setelah mengalami malapetaka krisis ekonomi global tahun 1998, maka keseluruhan system ekonomi nasional menjadi krisis. Kejadian krisis perekonomian nasional ini antara lain disebabkan ternyata sejak 1990 sector pertanian dan perdesaan kurang diperhatikan dan tidak dipersiapkan sebagai penyangga ekonomi dengan baik oleh pemerintah sehingga sector pertanian dan perdesaan tidak siap menjadi penyangga ekonomi (*buffer of economy*), sehingga menambah krisis ekonomi nasional (Affendi Anwar, 2005).

Disisi lain pertumbuhan penduduk yang menurun sejak 1970-an, ternyata diperdesaan terjadi pertumbuhan yang cepat pada angkatan kerja , karena tingginya tingkat kelahiran bayi masa lalu telah menjadi dewasa dan memasuki angkatan kerja pada tahun 1978-an. Peningkatan angkatan kerja di perdesaan yang terjadi tidak diimbangi dengan :

- a. Peningkatan ketersediaan lahan pertanian berakibat terjadi penurunan yang tajam keterbatasan ketersediaan lahan pertanian untuk masing-masing tenaga kerja dan
- b. Masalah institusional yang lemah dibidang kebijakan pertanahan (sebab ciri penting dari penduduk perdesaan adalah masalah kepemilikan tanah dan tanah merupakan dasar utama dari kesejahteraan dan kekuatan politik diwilayah perdesaan AE Yustika, 2005) .

Kesemuanya kini menjadi ancaman serius bagi pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan dimasa lalu sampai dengan saat ini.

Proses kemiskinan di perdesaan antara lain disebabkan oleh meningkatnya fragmentasi kepemilikan lahan, sehingga mengarah terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak berlahan diwilayah perdesaan. Hal ini mengakibatkan terjadi migrasi besar-besaran dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan tidak dapat dihindari. Tenaga kerja migrant tersebut diperkotaan ternyata hanya sedikit saja yang memperoleh kesempatan kerja produktif di sector modern. Selain dari pada itu aktivitas usaha diluar *on-farm* yaitu *off farm* diperdesaan, sedikit dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berbentuk usaha berskala kecil, termasuk usaha rumah tangga petani. Hal ini merupakan sumber-sumber penting untuk penyerapan angkatan

kerja diperdesaan dan peningkatan pendapatan . Diperkirakan pekerjaan tambahan di sector *off – farm* mengakibatkan pendapatan rumah tangga petani meningkat 20%-40% diluar usaha tani (*on farm*) , (Affendi Anwar, 2005).

Dari sudut lapangan kerja diperdesaan, para petani kecil memanfaatkan sumber daya alam (yaitu lahan dan air) dan kehidupannya sangat tergantung pada lahan ini (terutama tanah dan vegetasi). Para petani kecil merupakan kelompok *agents* penghubung terbesar pada kegiatan ekonomi yang terintegrasi kedalam system ekonomi pasar yang berpusat diperkotaan.

Secara ekonomi, wilayah perdesaan mengalami ketidaksempurnaan pasar (*market imperfection*). Wujud ketidak sempurna ini antara lain dapat berbentuk pasar yang tersegmentasi (*segmented market*), volume komoditas yang dipertukarkan kecil-kecil, sehingga pasar bersaing tidak mempunyai landasan untuk terwujud (*missing market*) dan pasar tidak terwujud sebagian (*partially missing*), karena terjadinya pengaliran penjatahan (*rationing*) pada pembagian air dan bersifat musiman (*seasonal*). Keadaan pasar-pasar yang bervolume kecil (volume yang dipertukarkan sedikit) menyebabkan terjadi ketidaksempurnaan pada persaingan. Sehingga keadaan ini mengarah kepada terjadinya system pertukaran yang dicerminkan oleh terjadinya gejala keterkaitan pasar (*interlinked market*) , seperti keterkaitan pasar komoditas, pasar kredit dan pasar asuransi yang dilakukan secara simultan yang biasanya dalam bentuk hubungan principal-agent antara tengkulak dengan para petani. (Affendi Anwar, 2005). Dalam keadaan ketidaksempurnaan pasar seperti ini, maka peranan harga-harga tidak lagi dapat menjadi sumber informasi yang sempurna (untuk mengalokasi sumber daya) dan akan mengarah kepada terjadinya isyarat-isyarat harga yang tidak benar (*false price signal*) atau pasar bersaing menjadi hilang sama sekali karena tidak dapat bekerja (*missing market*). Akibatnya, harga-harga tidak lagi menjadi pembawa informasi yang sempurna (*perfect carrier of information*) sehingga harga tidak lagi mampu sebagai coordinator alokasi sumberdaya yang efisien. Dengan demikian keadaan ini tidak memberikan arahan kepada perspektif yang baik untuk masyarakat perdesaan dalam mengalokasikan sumber-sumber dayanya kearah tingkat optimum dan berakibat mengalami ketidak efisiensi (*in-efficiencies*). Dampak lanjutannya aktivitas ekonomi mengarah dan mendorong untuk mengeksploitasi sumberdaya alam dan tidak mendorong terjadinya investasi modal dan akhirnya investasi yang ditanamkan di perdesaan menjadi terlalu rendah untuk usaha konservasi guna memelihara sumber daya tersebut.

Kondisi social-ekonomi dan sumber daya perdesaan yang memprihatinkan ini , pemerintah sering salah arah (*mis-leading government policy*) dalam melakukan intervensi, seperti kebijakan kredit dengan bunga khusus namun hanya dalam jangka pendek atau sesaat pada periode rezim pemerintahan yang sedang berlangsung. Demikian juga selama ini masih jarang para pakar ekonomi yang dapat memahami secara penuh keadaan perekonomian perdesaan dalam arti yang sesungguhnya.

1.2 Peranan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia terutama di Perdesaan.

UMK merupakan perwujudan konkret dari kegiatan ekonomi rakyat yang bertumpu kekuatan sendiri , terdesentralisasi , beragam dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi “ *buffer* “ saat perekonomian Indonesia dilanda krisis. Keragaman usaha UMK seperti petani kecil atau petani gurem, petani tanpa lahan, nelayan kecil, pedagang kecil, industri rumah tangga, dan sebagainya adalah pelaku ekonomi yang memberi andil cukup besar dalam perekonomian nasional. Fungsi dan peranan UMK

sangat penting bukan saja sebagai sumber mata pencaharian orang banyak tetapi juga menyediakan secara langsung lapangan kerja bagi masyarakat yang tingkat pengetahuan dan ketrampilannya rendah (Amran Husen , 2005)

Populasi UMK sangat besar serta jenis usahanya meliputi berbagai sektor dan sebagian besar bergerak disektor informal serta banyak menyerap tenaga kerja, ternyata keberadaannya kurang mendapatkan dukungan dari sektor perbankan. Hal ini terbukti pada informasi yang diperoleh dari :

- a. Data pada Kementrian Departemen Kopetrasi dan Usaha Mikro dan Kecil (2004) yang menyebutkan bahwa kelompok usaha mikro nasional sebanyak 41.800.000 unit (98,5%) dari total unit usaha nasional sebanyak 42.452.000 unit,
- b. Noer Sutrisno (2003) mengatakan akses usaha mikro termasuk usaha mikro agribisnis terhadap lembaga keuangan formal terutama bank sangat rendah yaitu hanya sekitar 12 %.
- c. Sri Hartati Samhadi (2006), Didik J Rachbini (2006) dan Dawam Raharjo (2005) menyebutkan bahwa usaha mikro pada umumnya bergerak disektor informal dan
- d. Biro Pusat Statistik (BPS, 2005) menyebutkan bahwa sektor informal yang diwakili oleh usaha mikro menyerap lebih dari 70% dari angkatan kerja, sedangkan sektor formal hanya menyerap 30% dari agkatan kerja,**
- e. Biro Pusat Statistik (BPS, 2006) menyebutkan bahwa dari 48,929 juta UMK , hanya sekitar 19,1 juta (39%) yang telah mendapat pinjaman dari bank, sementara sisanya yaitu 29,84 juta UMK (61%) masih belum dapat dilayani oleh perbankan.
- f. Hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (Fateta IPB) bekerja sama dengan Dinas Pelayanan Koperasi Provinsi Jawa Tengah (2004) diperoleh hasil bahwa dari kredit yang diajukan oleh usaha mikro kepada lembaga keuangan perbankan hanya disetujui 2% di Sukoharjo, 31% di Karanganyar, 34% di Pati, dan 77% di Kota Semarang.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa UMK di Indonesia dalam jumlah besar dan dominan mempunyai potensi untuk dikembangkan. Untuk itu, perlu dukungan kebijakan antara lain permodalan dan pendampingan agar usaha mikro dapat beralih menjadi usaha kecil dan jika berkembang dalam jumlah besar pada gilirannya akan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Beberapa bukti telah ada yaitu ;

- a. Pengalaman di Bangladesh menurut Sri Hartati Samhadi (2005) menunjukkan bahwa 3,7 juta debitur Bangladesh merupakan rumah tangga miskin sebagai usaha mikro yang terus-menerus mendapatkan akses fasilitas kredit mikro, ternyata mampu keluar dari garis kemiskinan setelah 5 (lima) tahun,
- b. Hasil penelitian Mat Syukur (1985) menunjukkan bahwa usaha mikro yang mendapat pelayanan kredit mikro rata-rata bisa menaikkan pendapatan 14-215% dari 87,34% responden,**

Untuk UKM di perdesaan banyak didominasi oleh rumah tangga petani (RTP) sebab 80 % penduduk Indonesia hidup diperdesaan dan lebih dari 70% masyarakat bermata pencaharian pertanian (RPPK, 2005). Sektor Pertanian di Indonesia menempati posisi yang strategis. Hal ini tidak saja dapat dilihat dari perannya sebagai penyangga pangan nasional, tetapi juga PDRB sektor pertanian berkontribusi sebesar 22,07 % (2005) walaupun lebih rendah dari sektor industri (30,36%), tetapi nilai kegiatan

agro-industri mencapai 41,37% dari keseluruhan nilai kegiatan industri. Sedangkan kegiatan-kegiatan sektor lain (perdagangan, konstruksi, transportasi dan jasa-jasa, kesemuanya merupakan dampak ganda (*multiplier effect*) dari kegiatan sektor pertanian. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro dan kebijakan moneter cenderung tidak memihak kepada usaha mikro dan kecil (UMK) dan memihak kepada pengusaha menengah dan besar dalam alokasi dana, sangat merugikan bangsa karena tidak memiliki ketahanan ekonomi yang fundamental.

1.3 Kondisi UMK Perdesaan terhadap Lembaga Keuangan

Sebesar 70% penduduk termiskin didunia berada diwilayah perdesaan mata pencaharian utamanya bersumber pada pola *pertanian subsisten*. Kondisi petani dengan pola *pertanian subsisten* masalah pokoknya adalah bagaimana mempertahankan hidupnya yang menyita seluruh perhatian dan tenaganya. Oleh karena itu bila negara menghendaki pembangunan yang berkesinambungan maka negara harus memulainya dari daerah perdesaan dan sektor pertanian (Sudjilah, 2005).

Pembangunan perdesaan yang bertumpu pada sektor pertanian tetap dianggap sebagai sektor terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi karena beberapa alasan (Hanani *et all*, 2003) ;

- a. Potensi sumber dayanya yang besar dan beragam
- b. Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar
- c. Besarnya pangsa terhadap ekspor nasional
- d. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini
- e. Peranannya dalam penyediaan pangan masyarakat
- f. Menjadi basis pertumbuhan ekonomi perdesaan

Potensi pertanian yang sangat besar, sampai saat ini sebagian pelaku ekonomi yang terlibat dalam sektor ini termasuk golongan sangat miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi pemerintah juga kurang memperhatikan sektor pertanian. Akibatnya usaha pertanian sampai saat ini masih didominasi oleh pengusaha dengan ciri-ciri ;

- a. Berskala kecil
- b. Bermodal terbatas
- c. Memiliki teknologi sederhana
- d. Sangat dipengaruhi oleh musim
- e. Wilayah pasarnya lokal
- f. Umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi)
- g. Akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah
- h. Pasar komoditi pertanian bersifat mono/oligopsoni sehingga terjadi eksploitasi harga pada petani (Abdul Hakim, 2002:287)

Demikian juga kondisi petani sebagai Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agribisnis di perdesaan pada umumnya sering terjebak lilitan hutang dari para pelepas uang yaitu para tengkulak melalui sistem ijon. Para tengkulak memberikan kredit kepada petani terutama dalam membiayai kehidupannya mulai dari masa tanam sampai menunggu masa panen berikutnya. Dalam praktiknya lembaga keuangan di perdesaan secara umum sangat merugikan petani.

Didalam perjanjian kreditnya tertulis jenis pinjaman, waktu pinjaman sangat tergantung pada variasi pinjaman dan segmentasi pasar dan kondisi ketidak sempurnaan pasar (Conning J, 2005). Pengelompokan peminjam dalam lembaga keuangan perdesaan tergantung pada jenis pinjaman dan kontrak perjanjian yang menggambarkan karakteristik usahanya. Dari pengalaman pada masa lampau ternyata pemerintah terlibat dalam pasar keuangan perdesaan melalui kelembagaan pemerintah yang ada.

Pada tahun 1969/1970 Pemerintah Indonesia menyediakan kredit bagi petani dengan program intensifikasi Bimas untuk usaha mikro sektor pertanian yaitu bagi petani kecil guna pembelian sarana produksi dan biaya hidup selama masa menunggu waktu panen dan pemerintah melanjutkan program Bimas dengan program intensifikasi khusus tahun 1979/1980 yang dikenal sebagai Kredit Usaha Tani (KUT) sampai masa reformasi. Pada program KUT para petani kecil juga sulit mengkases KUT dan kredit tersebut banyak dinikmati oleh elit-elit perdesaan. Hal ini terbukti pada hasil penelitian Marguerite S Robinson (2002) tentang kredit bagi petani diperoleh hasil seperti pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Pinjaman Rumah Tangga di Desa Indonesia
Menurut Sumber Pinjaman Terbesar Tahun 1980 – 1981.

Sumber Pinjaman	Desa G (Jawa Timur)	Desa C (Jawa Barat)	Desa R (Sulawesi Selatan)
Jumlah rumah tangga di desa	775	760	711
Rumah tangga yang melaporkan posisi pinjaman	76,6	58,9	35,8
Kredit Institusional	17,9	20,1	14,0
BIMAS	6,6	16,5	2,7
Bank/lainnya	11,3	3,6	11,3
Kredit Informal	82,1	79,9	86,0
Pedagang	16,5	26,9	2,1
Keluarga	37,4	14,8	40,5
Lainnya (non keluarga)	28,2	38,2	43,4
Total	100	100	100

Pada tabel 1.1 hasil penelitian Marguerite S Robinson (2002) mengatakan bahwa walaupun sudah ada KUT pada tahun 1980/1981 terdapat gejala kuat bahwa para petani di Jawa Timur , Jawa Barat dan Sulawesi Selatan pada lokasi penelitian sudah banyak yang memanfaatkan kredit atau pinjaman dari lembaga informal sebanyak 82,1% di Jawa Timur, 79,9% di Jawa Barat dan 86% di Sulawesi Selatan. Padahal sector pertanian selain sebagai sector yang sangat strategis , sector pertanian juga memiliki linkage terhadap sector-sektor non pertanian dan memeberikan efek ganda (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian nasional. Setelah terjadi tunggakan kredit KUT yang cukup besar, program KUT dihentikan.

Dari penjelasan tersebut salah satu *persoalan yang rumit di perdesaan adalah penyediaan dan aksesibilitas modal*. Keterbatasan modal menyebabkan sirkulasi kegiatan ekonomi tidak berjalan. Sebaliknya, tanpa ada perputaran aktifitas ekonomi proses akumulasi kapital juga tidak bisa terjadi. Permodalan bukan merupakan faktor utama bagi kemajuan usaha mikro termasuk usaha mikro sektor pertanian, melainkan tetap saja permodalan adalah persoalan yang cukup signifikan dan pelik yang menghambat perkembangan usaha mikro. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pasar keuangan yang sehat bagi kelompok pengusaha mikro, sehingga setiap upaya untuk mendorong produktivitas kelompok ini nilai tambahnya terbang dan dinikmati oleh pelepas uang. Hal ini didukung oleh pendapat Noer Sutrisno (2003) yang mengatakan bahwa *ketersediaan permodalan* yang secara mudah dapat terjangkau oleh pengusaha mikro adalah *sangat vital* karena kelompok ini selalu menjadi *korban eksploitasi pelepas uang*. Oleh sebab itu, diharapkan adanya pasar keuangan yang sehat yang keberadaannya tidak lepas dari peran lembaga keuangan.

Untuk memenuhi kebutuhan uang tunai atau likuiditas guna membeli faktor-faktor produksi, pemerintah telah menyediakan lembaga keuangan yang sehat, yaitu dengan dapat diaksesnya Bank Rakyat Indonesia (BRI UNIT DESA) hingga tingkat kecamatan, juga bank lain. Namun petani (usaha mikro dan kecil/UMK agribisnis) bila mengakses kredit melalui lembaga keuangan bank (LKB), selama ini prosedurnya dianggap terlalu berbelit-belit, prosesnya lama dan operasionalnya/pelayanannya hanya pada jam kantor. Padahal mereka (UMK) membutuhkan pelayanan mulai siang hari sampai menjelang subuh dengan prosedur yang sederhana dan waktu singkat. Kondisi seperti ini memberikan peluang bagi lembaga keuangan non-bank (LKNB) yang lain untuk memanfaatkannya. LKNB tersebut antara lain koperasi simpan pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya untuk melayani UMK.

Bila ditinjau dari sisi penawaran kredit oleh lembaga keuangan bank dibutuhkan persyaratan kredit mikro :

- a. Menuntut 5C yang terdiri atas *character, collateral, capacity, capital dan condition of economy*,
- b. Menuntut kelayakan teknis, ekonomis, dan yuridis,
- c. **Menetapkan bunga tertentu tanpa pembinaan karena pembinaan merupakan tambahan *cost of money*,**
- d. Minimisasi risiko dengan adanya jaminan atau penjaminan.

Sedangkan bila ditinjau dari sisi permintaan kredit oleh usaha mikro, terdapat kondisi-kondisi:

- a. **Bisnis UMK mempunyai skala ekonomi mikro dan kecil,**
- b. **UMK menginginkan prosedur yang mudah dan cepat agar dapat segera memanfaatkan peluang usaha yang terbatas waktunya,**
- c. **UMK pada umumnya tidak memiliki legalitas yang memadai karena mengurus legalitas / izin biayanya relatif besar, dan**
- d. **UMK tidak memiliki pembukuan yang akurat sebagai alat penilaian.**

Permasalahan utama yang berkaitan dengan sulitnya UMK mengakses kredit kepada lembaga keuangan bank disebabkan oleh apa yang disebut dengan *asymmetric information*, yaitu lembaga keuangan formal terutama bank tidak sempurna mendapat informasi tentang kegiatan usaha mikro dan kecil atau sebaliknya, usaha mikro dan kecil tidak bisa mencari lembaga keuangan yang tepat dengan kondisinya. *Asymmetric*

information membuat calon pemberi pinjaman kesukaran memprediksi peluang *state-contingent payoffs*. Untuk mengkompensasi risiko tersebut, pemberi pinjaman meningkatkan tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh calon penerima kredit dan penyediaan jaminan (*collateral*) yang harus disediakan oleh calon penerima kredit. Dalam beberapa kasus, jaminan yang disediakan oleh calon penerima pinjaman tidak dapat berfungsi dengan baik karena jenis atau tipe jaminan yang tidak dapat diterima dan mahal serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan klaim atas jaminan jika kredit yang diberikannya sehingga dinyatakan *default*.

Pemberi pinjaman juga pasti akan kesulitan untuk membuktikan apakah laporan tentang kegagalan panen ini asli atau tidak. Hal ini akan membuat pemberi pinjaman akan sulit sekali untuk yakin. Berdasarkan pengalaman pemberi pinjaman akan membuat kebijakan membatasi jumlah kredit (*credit rationing*) yang akan diberikan kepada peminjam. Konsep ini sering kali digunakan untuk memberikan wawasan dalam menginterpretasikan kondisi pasar keuangan ke dalam kontrak yang akan dibuat.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa :

- a. **Agunan tanah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *credit rationing*** (Boucher, 2002), sedangkan hasil penelitian Nunung et al. (2005) menunjukkan hasil yang tidak signifikan;
- b. **Pada penelitian Boucher (2002) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap *credit rationing***, sedangkan pada penelitian Nunung et al, (2005) dan Giang Ho (2004) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap *credit rationing*;
- c. **Variabel modal usaha yang diteliti oleh Boucher (2002) berpengaruh positif terhadap *credit rationing***, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Giang Ho (2004) yang menunjukkan bahwa modal usaha berpengaruh negatif terhadap *credit rationing*;
- d. **Pada variabel jarak lokasi usaha ke pasar berpengaruh positif terhadap *credit rationing*** (Giang Ho, 2004), tetapi jarak lokasi usaha ke pasar berpengaruh negatif terhadap *credit rationing* (Nunung et al. ,2005);
- e. **Untuk variabel umur, hasil penelitian Boucher (2002) menunjukkan bahwa umur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *credit rationing***, sedangkan pada penelitian Nunung et al. (2005) umur memiliki pengaruh yang tidak signifikan;
- f. **Skala usaha menurut penelitian Boucher (2002) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *credit rationing*** sedangkan pada hasil penelitian Nunung et al. (2005) menunjukkan hasil yang tidak signifikan;
- g. **Penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada daerah pertanian beririgasi teknis (bukan tadah hujan);**
- h. **Penelitian yang sudah ada dilakukan pada tanaman padi dan palawija, sedangkan pada penelitian ini lebih ditekankan pada tanaman hortikultura;**
- i. **Belum ada yang meneliti tentang pengaruh frekuensi kunjungan, hal ini didasarkan pada pendapat James Scott (1976) yang mengatakan bahwa di**

masyarakat perdesaan rasionalitas sosial lebih dominan daripada rasionalitas ekonomi sehingga kebersamaan atau rasa persaudaraan lebih dominan daripada pendekatan ekonomi yang lebih sulit “bekerja” dan

j. **Status kepemilikan tanah terhadap *credit rationing*.** Dari hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa variable-variable yang dipergunakan dalam penelitian adalah semata-mata representasi dari “*Five Principle*” yang biasanya digunakan oleh perbankan yaitu meliputi : *collateral, character, capacity, condition dan capital*.

Selain fenomena-fenomena tersebut diatas, penelitian-penelitian terdahulu menemukan bahwa pembatasan kredit melalui *Credit Rationing* dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa factor :

- a. Umur petani (Boucher, 2002),
- b. Lama pendidikan (Boucher, 2002),**
- c. Jarak lokasi usaha tani ke pasar (Boucher, 2002).
- d. Status kepemilikan lahan (Boucher, 2002 dan Giang Ho, 2004),
- e. Modal usaha atau likuiditas (Boucher, 2002 dan Giang Ho, 2004),
- f. Lama pengalaman pada usaha yang sama (Boucher, 2002 dan Giang Ho, 2004),**
- g. Luas lahan atau skala usaha (Boucher, 2002),
- h. Agunan (Boucher, 2002 dan Giang Ho, 2004),

Hasil penelitian terdahulu dapat disajikan secara ringkas dalam wujud tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2
Research Gap**

Faktor	Peneliti	Hasil Penelitian
Umur	Boucher, 2002	(-), Signifikan
	Giang Ho, 2004	
	Barslund dan Tarp, 2006	
	Okurut, Schombee, Berg, 2004	(+), Tidak Signifikan
	Riskayanto dan Sulistiowati, 2007	(-), Tidak Signifikan
	Duong dan Izumida, 2002	
Pendidikan	Chakravaty, 2002	
	Boucher, 2002	(+), Signifikan

	Nunung et al., 2005	
	Okurut, Schombee, Berg, 2004	
	Riskayanto dan Sulistiowati, 2007	(+), Tidak Signifikan
	Barslund dan Tarp, 2006	
	Duong dan Izumida, 2002	
	Narayan dan Pritchett, 1997	
Jarak Pasar	Tirole, 2004	(-), Signifikan
	Giang Ho, 2004	(+), Tidak Signifikan
	Nunung et al., 2005	
	Barslund dan Tarp, 2006	(-), Tidak Signifikan
	Narayan dan Pritchett, 1997	
Frekuensi Kunjungan	Gonzales, Vega et. al., 1996	Belum pernah dilakukan penelitian empiris
	menemukan bahwa peminjam yang memiliki kinerja yang baik merupakan klien yang dikenal dan sering bertemu	
	Okurut, Schombee, Berg, 2004	
	menyebutkan karakter khusus peminjam (mempunyai kekuatan), mempunyai hubungan baik untuk kerjasama selanjutnya	
Status Kepemilikan	Giang Ho, 2004	(+), Signifikan
	World Bank Institute, 2005	
Modal Usaha	Boucher, 2002	(+), Signifikan
	Giang Ho, 2004	
	Nunung et al., 2005	(-), Signifikan
	Barslund dan Tarp, 2006	
		Lanjutan Tabel 1.2
	Narayan dan Pritchett, 1997	(+), Tidak Signifikan
Lama Usaha	Giang Ho, 2004	(+), Signifikan
	Riskayanto dan Sulistiowati, 2007	(+), Tidak signifikan
Luas Lahan	Boucher, 2002	(+), Signifikan
	Giang Ho, 2004	
	Barslund dan Tarp, 2006	
Agunan Tanah	Boucher, 2002	(+), Signifikan

Sedangkan kondisi perkreditan sektor pertanian di Jawa Tengah menurut Bank Indonesia adalah sebagai berikut : pada periode Desember 2004 total kredit yang disalurkan di Jawa Tengah sebanyak Rp 9,757 triliun, dan untuk sektor pertanian sebesar Rp 2,18 triliyun (22,35%) serta mayoritas kredit untuk pertanian berasal dari

bank pemerintah sebesar Rp 1,76 triliun (18,05%) dan dari bank swasta sebesar Rp 419,78 milyar (4,33%). Pada periode Desember 2005 total kredit sebesar Rp 12,449 triliun bagi usaha kecil berbagai sektor ekonomi, ternyata kredit sektor pertanian per Desember 2005 sebesar Rp 2,317 triliun (18,6%) dan mayoritas kredit tersebut sebagian besar berasal dari bank pemerintah Rp 2,88 triliun (15,15%) dan dari bank swasta sebesar Rp 431,3 milyar (3,45%) (Bank Indonesia Jateng 2006). Dari data tersebut disimpulkan bahwa untuk Jawa Tengah secara kuantitatif kredit untuk sektor pertanian naik, tetapi tidak sebanding dengan kenaikan total kredit.

Dari 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berpenduduk + 32,5 juta jiwa dan jumlah tenaga kerja total sebanyak 16,44 juta jiwa dan yang bekerja di sektor pertanian mencapai 6,78 juta jiwa atau 44,6% (BPS 2004) dan hampir semua kabupaten mengandalkan sektor pertanian sebagai komoditi utama perekonomian daerah. Provinsi Jawa Tengah dalam pembangunan perdesaan bertumpu pada pembangunan pertanian menggunakan pendekatan wilayah perdesaan berbasis pertanian. Dari ke-35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang sebagai salah satu kabupaten oleh Pemda Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat ditetapkan sebagai daerah wisata dan pengembangan pertanian yang disebut Agropolitan yaitu di kecamatan Bandungan dan Sumowono. Di Jawa Tengah terdapat 8 (delapan) wilayah agropolitan. Pemilihan wilayah Agropolitan Bandungan – Sumowono sebagai lokasi penelitian disebabkan oleh agropolitan mensyaratkan wilayah pertanian terpadu yg mempunyai fasilitas prasarana jalan yg baik, penerapan system agribisnis secara penuh meliputi ; agro input – agro output – agro processing – agro marketing. Untuk ke 7 (tujuh) wilayah agropolitan persyaratan-persyaratan tersebut masih dalam proses , sedangkan wilayah agropolitan Bandungan – Sumowono memiliki fasilitas tersebut sudah sejak lama terutama jalan, apalagi untuk fasilitas agro marketing Bandungan-Sumowono memiliki 4 (empat) pasar agropolitan yang menjadi pusat pemasaran hortikultura Jawa Tengah namun juga hasil-hasil hortikultura Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat banyak dipasarkan di 4 (empat) pasar agropolitan tersebut yaitu : 1) Pasar Bandungan dan 2) Pasar Sumowono pada umumnya didominasi oleh pemasaran buah-buahan dan hortikultura lain, 3) Pasar Jimbaran juga sebagai pusat pasar sayur-sayuran serta 4) Sub Terminal Agribisnis di desa Jetis. Kecamatan Bandungan dan Sumowono sebagai penyangga utama produk-produk pertanian terutama hortikultura di ketiga pusat pemasaran tersebut.

Dari survei pendahuluan para petani mempunyai kendala utama yaitu kesulitan uang tunai/modal yang mereka miliki untuk keperluan usaha agar berkelanjutan (*sustainable*), bagi usaha taninya. Hal ini disebabkan persediaan modal / uang tunai yang dimiliki petani sangat terbatas, sehingga melemahkan posisi tawar mereka berhadapan dengan pelaku ekonomi yang lain karena mereka seringkali terpaksa buru-buru melepaskan produk pertanian untuk dijual tanpa memperhatikan harga jual yang layak karena mereka butuh uang tunai segera demi berlangsungnya usaha tani mereka untuk periode berikutnya.

Di Bandungan dan Sumowono sebagai wilayah agropolitan, para petani juga mengalami kesulitan dalam mengakses kredit untuk keperluan membeli kebutuhan faktor-faktor produksi seperti pupuk, bibit dan obat-obatan. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Keterbatasan jumlah lembaga keuangan yang berada di Bandungan dan Sumowono,
- b. Para petani sangat terbatas mempunyai informasi tentang lembaga keuangan dalam mengajukan kredit bagi keperluan menambah modal usaha tani,
- c. Keterbatasan agunan yang dimiliki petani,
- d. Sulit mencari lembaga keuangan yang menawarkan jenis kredit yang sesuai jenis kredit

yang diminta.

Namun sebaliknya dari hasil wawancara dengan beberapa lembaga keuangan yang berada di lokasi penelitian ternyata :

- a. Lembaga keuangan juga sangat terbatas sekali mengetahui keberadaan dan kondisi usaha para petani,
- b. Sehingga lembaga keuangan juga ragu-ragu atau membatasi pinjaman / kredit kepada petani terutama untuk usaha tani dan mengutamakan calon debitur dari para pedagang kelontong dibandingkan dengan petani.

Oleh sebab itu lembaga keuangan di Bandung dan Sumowono mengalami *asymetri informasi* terhadap petani sehingga mereka juga memberlakukan *credit rationing* terhadap petani. Demikian juga kondisi petani atau UMK Agribisnis di Bandung dan Sumowono merasakan bahwa dalam mengajukan kredit, mereka sering ditanya dan melihat bukti atau kenyataan melalui kunjungan petugas kreditur kerumah calon debitur dan atau ke lokasi usaha tani maupun melalui wawancara dengan tetangganya mengenai :

- a. Umur calon peminjam, status calon peminjam serta pandangannya terhadap tanggung jawab keluarga,
- b. Pendidikan atau lama pendidikan calon peminjam,
- c. Jarak pasar dari tempat usaha maupun cara petani menjual hasil pertaniannya,
- d. Seringnya petugas dari kreditur mendatangi tempat tinggalnya maupun berkunjung di sawah/ladang/tegalan tempat usahanya.
- e. Modal usaha yang dimiliki sebelum mengajukan kredit,
- f. Status kepemilikan tanah yang diusahakan milik sendiri, sewa atau meminjam dari saudara lama kegiatan usaha yang diajukan kredit serta pandangannya terhadap usaha tani yang diusahakan,
- g. Luas lahan yang diusahakan dan alternatif-alternatif komoditi pertanian yang lain,
- h. Agunan yang dimiliki sebagai jaminan untuk meminjam kredit, serta kerelaan asetnya dipergunakan sebagai jaminan pinjaman

Mengingat kesamaan karakter antara Peru dalam penelitian Boucher (2002) , penelitian Giang Ho (2004) di Vietnam, dan Indonesia juga sebagai salah satu negara berkembang dan sering terjadinya *miss match demand* dan *supply* kredit di perdesaan di Indonesia, maka perlu penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi *credit rationing* di wilayah perdesaan. Diharapkan setelah diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi *credit rationing* dan pola pelayanan lembaga keuangan bank dan non-bank serta kondisi masyarakat perdesaan akan didapatkan model pemberdayaan UMK agribisnis melalui pembiayaan (perkreditan) dalam pasar keuangan perdesaan.

2. Perumusan Masalah

Rumah tangga petani mempunyai permasalahan terhadap lembaga keuangan dalam mengajukan permintaan kredit untuk menambah permodalan guna meningkatkan usaha para petani. Kesulitan yang dialami oleh para debitur tersebut adalah meliputi :

- a. Jenis kredit yang diminta,**
- b. Besarnya dana yang disetujui tidak sesuai dengan dana yang dibutuhkan,**
- c. Lamanya waktu proses,**
- d. Berbelit-belitnya prosedur yang dihadapi terutama dari lembaga perbankan,**
- e. Kekurang harmonisan hubungan petani dengan lembaga keuangan**

perdesaan .

Masalah lain adalah kegagalan pasar kredit perdesaan dalam menyalurkan kredit ke masyarakat. Kegagalan pasar keuangan terjadi bilamana pasar persaingan gagal melaksanakan alokasi kredit secara efisien. Pasar kredit perdesaan, dalam prakteknya sehari-hari menyimpang dari pasar kredit yang ideal dalam pasar persaingan sempurna karena hadirnya biaya transaksi, informasi asimetris dan risiko finansial. Lembaga keuangan lebih cenderung menggunakan paradigma yang sama dalam melihat pasar kredit perdesaan dan perkotaan. Padahal struktur produksi atau sektor ekonomi perdesaan sangat berbeda dengan struktur produksi atau sektor ekonomi perkotaan. Struktur ekonomi perkotaan cenderung sudah berkembang baik khususnya dari sudut aspek legal. Dengan demikian pihak lembaga keuangan tidak mengalami kesulitan dalam melakukan *screening* terhadap calon peminjam. Oleh karena itu, membangun suatu model kelembagaan yang efektif dalam proses pemberian kredit pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil terutama di sektor agribisnis merupakan suatu kebutuhan dan keharusan.

Hasil wawancara dengan petani dan beberapa yang dilakukan pada survei pendahuluan diperoleh informasi bahwa selain luas lahan yang dikelola petani dalam menentukan jumlah kredit atau pinjaman yang diterima, status telah menikah lebih mudah untuk mendapatkan kredit, disamping itu nilai dan status kepemilikan tanah yang diagunkan juga turut menentukan jumlah kredit atau pinjaman yang diterima.

Kondisi diatas membuahakan berbagai pertanyaan bagi para pelaku program, pelaku bisnis, dan lembaga keuangan itu sendiri. Pertanyaan berikut merupakan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini :

- a. Bagaimana kondisi permintaan dan penawaran kredit di perdesaan ?,
- b. Bagaimana struktur pasar keuangan perdesaan ?,
- c. Bagaimana praktik-praktik kredit rumah tangga petani?,
- d. Bagaimana *credit rationing* di pasar kredit perdesaan ?

3 . Tujuan Penelitian

3.1 Tujuan Umum

Mengetahui sebab-sebab terjadinya *credit rationing* dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *credit rationing* di pasar kredit perdesaan.

3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui tentang jenis kredit yang diminta dan jenis kredit yang ditawarkan di perdesaan.
- b. Untuk mengetahui tentang struktur pasar keuangan perdesaan.
- c. Untuk mengetahui tentang hubungan antara rumah tangga petani dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB).
- d. Untuk mengetahui perilaku pengambilan keputusan rumah tangga petani dan lembaga keuangan dalam *credit rationing* di pasar kredit perdesaan .
- e. Untuk menganalisis *credit rationing* di perdesaan.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritik dan praktis. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan :

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah untuk memberikan kebijakan baru terhadap para usaha mikro dan kecil agribisnis dalam kemudahan memperoleh akses perkreditan untuk usaha tani,
 - b. Pemerintah perlu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *credit rationing* sehingga upaya UMK agribisnis untuk meningkatkan akses ke lembaga keuangan mengacu pada faktor-faktor tersebut.
- Secara teoritik/ ilmu pengetahuan hasil penelitian ini dapat dijadikan:
- a. Sebagai masukan sejauh mana relevansi teori-teori yang dikembangkan di perguruan tinggi dengan fakta empiris di lapangan,
 - b. Untuk menambah atau memperkaya model permintaan kredit untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil agribisnis.

5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian-penelitian yang disebutkan cenderung melihat permintaan kredit dari sudut ekonomi makro. Fokus yang terlalu makro menghilangkan kemampuan melihat bagaimana sesungguhnya keseimbangan kredit di perdesaan yang sebagian besar peminjam potensialnya adalah petani yang terkait dengan pertanian. Tingkat suku bunga senantiasa diasumsikan dan tanpa ada upaya pengujian secara empiris apakah keseimbangan kredit selalu mengacu kepada proses penyesuaian oleh tingkat suku bunga. Di sektor perdesaan, bunga bukan merupakan faktor dominan penentu permintaan akan kredit. Seringkali ditemukan masyarakat yang mau membayar tingkat suku bunga yang tinggi dengan syarat proses pencairan kredit lebih cepat dan tepat waktu. Seringkali terjadi pembatasan akses terhadap kredit baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau calon peminjam itu sendiri. Implikasinya, jumlah kredit yang dapat disalurkan ke sektor riil di perdesaan sangat terbatas. Oleh karena diperlukan penelitian yang menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi kecenderungan terjadinya pembatasan akses kredit.

Analisis *credit rationing* di negara-negara lain sudah banyak dilakukan (Mpuga, 2000) dan Boucher (2002). Akan tetapi karakteristik masyarakat yang berbeda akan berdampak yang berbeda terhadap hasil penelitiannya. Jumlah dan jenis *credit rationing* menurut Boucher (2002) diyakini akan berbeda jika penelitian dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam tema penelitian *credit rationing*. Untuk melihat bagaimana persepsi atau karakteristik masyarakat mempengaruhi *credit rationing* maka penelitian kearah itu perlu dilakukan. Kalau hanya menggunakan hasil estimasi peneliti asing dengan lokasi penelitian di luar negeri sebagai bahan rujukan pengambilan keputusan, dikhawatirkan akan *bias dan tidak efektif*, untuk mengisi *research gap* inilah penelitian ini dilakukan.

Penelitian di Indonesia mengenai dinamika pasar kredit perdesaan lebih cenderung melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan kredit. Kelemahan pendekatan ini adalah pengambil keputusan hanya melihat peubah apa yang berpengaruh terhadap besarnya kredit yang diterima oleh peminjam. Padahal dalam masyarakat tidak semua orang memiliki akses terhadap lembaga keuangan. Analisis yang menggunakan metode analisis peluang hanya fokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi peluang meminjam ke lembaga keuangan. Tidak ada penelitian atau kajian yang secara khusus membahas mengapa masyarakat terbatas aksesnya ke lembaga keuangan, dan faktor apa saja yang mempengaruhi pembatasan alokasi kredit.

Oleh karena itu penelitian diharapkan dapat mengisi kekosongan hal tersebut dan memberikan gambaran yang jelas kepada lembaga keuangan dan pemerintah bagaimana meningkatkan kinerja (*performance*) kredit perdesaan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, originalitas penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian terdahulu di daerah irigasi teknis sedangkan penelitian sekarang di daerah setengah irigasi teknis dan tadah hujan.
Di daerah irigasi teknis, ketersediaan air berlimpah dan bertani ditingkat *on farm* kebutuhan air sangat didominasi, terutama bagi padi dan palawija. Air sebagai faktor produksi utama pertanian *on farm* . Sedangkan di daerah setengah irigasi atau tadah hujan ketersediaan air sangat terbatas dibanding daerah beririgasi teknis, sehingga masalah kecukupan atau kebutuhan air di daerah setengah irigasi atau tadah hujan tidak ada yg menjamin . Hal ini berakibat pada resiko besar bagi tanaman terutama untuk tanaman padi dan palawija.
- b. Penelitian terdahulu pada umumnya berkomoditas padi dan palawija, sedangkan penelitian sekarang lebih banyak didominasi dengan tanaman hortikultura.
Padi dan palawija sangat membutuhkan banyak air sedangkan hortikultura kurang membutuhkan banyak air. Harga padi dan palawija sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah melalui kebijakan *floor price* dan *selling price* dan kebutuhan padi dan palawija setiap tahun relatif tetap atau tidak bertambah. Sedangkan permintaan hortikultura setiap tahun meningkat dan harga hortikultura tidak diatur dan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, sehingga harga hortikultura ditentukan oleh mekanisme pasar. Pada umumnya harga hortikultura lebih baik dari pada harga padi dan palawija, sehingga hortikultura dianggap oleh petani merupakan komoditi yang menjanjikan/prospektif.
- c. Penelitian terdahulu belum meneliti tentang pengaruh kunjungan petugas kreditur kepada debitur, didalam penelitian ini sebagai variabel frekuensi kunjungan.
Diharapkan faktor kunjungan petugas kreditur ke debitur ini dapat mengurangi *asymetri information* kreditur terhadap debitur, sebab melalui frekuensi kunjungan akan diketahui jejak rekam debitur sehingga akan mempengaruhi besarnya *Credit Rationing*.
- d. Tempat penelitian terdahulu di daerah perdesaan biasa dan bukan merupakan wilayah perdesaan yang dibina oleh pemerintah menjadi wilayah percontohan untuk pembangunan perdesaan yang berbasis pertanian disebut wilayah agropolitan.
Daerah penelitian sebagai wilayah agropolitan diharapkan merupakan wilayah perdesaan yang representatif sebagai desa percontohan menuju wilayah metropolitan berbasis pertanian baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial budayanya masyarakatnya.
- e. Pada penelitian terdahulu lembaga keuangan yang terlibat dalam penelitian adalah lembaga keuangan formal terutama bank sedangkan dalam penelitian ini lembaga keuangan yang diambil / terlibat dalam penelitian terdiri atas lembaga keuangan formal atau lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan non bank (LKNB).
Di wilayah penelitian petani bebas memilih (*free choice*) untuk mengakses lembaga keuangan bank (LKB) atau lembaga keuangan non bank (LKNB).

Sumber : Marguerite S. Robinson (2002)